

Akuntabilitas Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Operasional di Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk Provinsi Jambi

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ARDIANSYAH

07011181520025

Konsentrasi Keuangan Negara

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**AKUNTABILITAS ANGGARAN PEMELIHARAAN KENDARAAN
OPERASIONAL DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**MUHAMMAD ARDIANSYAH
07011181520025**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2020

Pembimbing I

**Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001**



Pembimbing II

**Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Akuntabilitas Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Operasional di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada Tanggal 30 Juli 2020

Inderalaya, Agustus 2020

Ketua:

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



.....

Anggota:

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



.....

2. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S., M.M
NIP. 195811191985031003



.....

3. Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002



.....

Mengetahui:
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M. Si
NIP : 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Be Seen and Be Scene.”

(Pee Wee Gaskins)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- **Orang tuaku**
- **Saudara-saudaraku**
- **Orang terdekatku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Teman-temanku**
- **Agama dan Bangsa**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Azza Wa Jalla, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Operasional di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan skripsi ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Alm. Papa Sirajuddin, S.H Mama Melly dan Badran Sa'adi yang sangat mendukung dan selalu memberikan doa serta menjadi penyemangat untukku.
2. Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan FISIP UNSRI.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
4. Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan skripsi ini.
5. Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si selaku Pembimbing Akademik
7. Seluruh Keluarga Besar DP2AP Provinsi Jambi
8. Seluruh staf beserta karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
9. Saudara-saudaraku, serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa untukku.
10. Pee Wee Gaskins, Pamungkas, Baskara Putra dan Gofar Hilman yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hari
11. Seluruh kerabat dan sahabat penulis yang mendukung proses Skripsi ini, Bang-bang, Tengah Malam, Kosman dan followers di Instagram

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Maret 2020
Penulis



Muhammad Ardiansyah

ABSTRACT

The research in this thesis is motivated by the still problems with operational vehicles that are still not optimal. Therefore this research uses descriptive qualitative method. Sources of data obtained are based on primary data through interviews and observations, and secondary data through documents, reports, regulations, and other sources. By using J.B Ghartey's theory which consists of 3 dimensions, mechanism, actor, and value. The results of this study indicate that the Accountability of the Operational Vehicle Maintenance Budget in the Women's Empowerment Office for Child Protection and Population Control in Jambi Province has not been good because there are still many problems in the field. As there are still operational vehicles that are lost, lightly damaged and severely damaged but each year are close to the target of the realization of the official budget, there are operational standards for the implementation of the Accountability Budget for Operational Vehicle Maintenance at the Women's Empowerment Office for Child Protection and Population Control in Jambi Province has been stipulated in the Law No. 17 of 2003 concerning State Finances which in the field implementation there are still many obstacles encountered. The suggestion from this finding is to improve the application of a computerized database system so that it is fully running optimally, data collection of official operational vehicle users to be effective.

Keywords: Accountability, Budget, Maintenance

Advisor I



Drs. Mardianto, M.Si

M.S i

NIP. 196211251989121001

196911191998032001

Advisor II



Ermanovida, S.Sos.

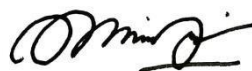
NIP.

Inderalaya, August 2020

Chairman of Public Administration Science Departement

Faculty of Social Science and Political Science

Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landaasan Teori.....	8
1. Akuntabilitas	8
2. Pengertian Anggaran Sektor Publik	14
3. Pengertian Dana Operasional.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pemikiran	25
BAB III	26
METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Definisi Konsep	27
C. Fokus Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	29
BAB IV.....	31
HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Dasa Hukum.....	32
B. Susunan Organisasi	35
C. Pembahasan.....	38
BAB V PENUTUUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Kendaraan yang dipelihara di DP3AP2 Provinsi Jambi.....	4
Tabel 2. Realisasi Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Operasional.....	5
Tabel 3. Kondisi Kendaraan Dinas yang rusak dan hilang... ..	6
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan.....	37
Tabel 6. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan	37
Tabel 7. Jumlah Pejabatan Struktural	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. DPA Pemeliharaan Kendaraan Operasional.....	40
Gambar 2. Realisasi Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Operasional.....	40
Gambar 3. Kendaraan Operasional Yang Optimal.....	43
Gambar 4. Kendaraan Operasional Yang Sudah Tidak Layak Pakai.....	44

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Pola Pelaksanaan Akuntabilitas.....	12
Bagan 2 Kerangka Pemikiran.....	39
Bagan 3 Struktur Organisasi Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi.....	49

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
PERMENDAGRI	: Peraturan Pemerintah Dalam Negeri
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
DP3AP2	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PEMDA	: Pemerintah Daerah
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
SPJ	: Surat Pertanggung Jawaban

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tugas penting dari pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan dan membangun infrastruktur publik melalui alokasi dan pelaksanaan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran daerah merupakan alat terpenting bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat sebagai pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk memperoleh informasi terkait dengan aktivitas atas pelaksanaan anggaran tersebut.

Akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban dari suatu badan hukum atau instansi pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban untuk melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan hasil pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah harus menyajikan informasi yang terkait dengan pengelolaan dana publik untuk memberikan penjelasan secara lengkap kepada seluruh kelompok *stake-holders*, sebagai perwujudan transparansi pengelolaan dana publik untuk menciptakan *well-informed society*.

Akuntabilitas anggaran adalah anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dari sisi proses, pencapaiannya dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terutama kelompok sasaran, yaitu masyarakat. Kemudian dari sisi hasil, anggaran akuntabel harus diimplementasikan dengan cara-cara yang transparan dan kompetitif. Akuntabilitas berkaitan dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Akuntabilitas memiliki makna bahwa setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara atau daerah harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan Negara harus didasarkan pada asas-asas umum yaitu salah satunya akuntabilitas yang berorientasi pada hasil. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, akuntabilitas publik merupakan kata kunci. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*), maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tentu saja harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan untuk pelayanan publik. Berhubungan dengan usaha pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap melalui penganggaran belanja modal pada tiap-tiap tahun anggarannya, sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada akumulasi belanja modal yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun, berdampak pada meningkatnya jumlah dan nilai aset tetap pemerintah daerah. Peningkatan tersebut juga terjadi pada aset tetap kendaraan dinas. Peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah maupun pada aset, telah menyadarkan pemerintah untuk memiliki sebuah sistem pengelolaan aset yang baik. Kebutuhan ini terjawab dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah yang dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. - 17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Menurut Peraturan pemerintah (PP) No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah tersebut pengelolaan barang daerah antara lain: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tututan ganti rugi.

Barang Milik daerah dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun Nomor 17 Tahun 2007, antara lain :

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
2. Barang yang diperoleh lainnya yang sah yaitu :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang Milik Daerah yang secara fisik dan legal dimiliki pemerintah yang berkaitan dalam tugas pokok dan fungsinya mencakup barang milik daerah tetap yang jumlahnya sangat banyak klasifikasi barang milik daerah tetap tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Peralatan sebagai sarana pendukung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan sangatlah penting sebagai proses penyelenggaraan kegiatan administrasi kantor pemerintahan daerah. Untuk peralatan dan mesin terdiri mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh investaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan manfaatnya lebih dari satu tahun dalam kondisi siap pakai.

Pemeliharaan adalah suatu tahap yang sangat penting dalam penggunaan barang milik daerah. Tujuan pemeliharaan antara lain :

- a. Untuk merawat sarana dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.
- b. Barang milik daerah yang dibiayai cukup tinggi melalui APBD pada setiap tahun anggaran maka untuk itu diperlukan pemeliharaannya.

Dalam kewenangan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ada pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang di tangan penguasaannya. Semua pejabat di daerah sering melakukan perjalanan dinas atau pengawasan program/kegiatan termasuk di DP3AP2 Provinsi Jambi yang menggunakan kendaraan untuk mencapai kinerja yang baik. Kendaraan dinas yang dimiliki oleh DP3AP2 Provinsi Jambi yang terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan yang Dipelihara/Dibiayai di DP3AP2 Provinsi Jambi

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan(unit)
1.	Roda Empat	11
2.	Roda Dua	13
Jumlah		24

Sumber : Subbagian Perlengkapan Bagian Umum DP3AP2 Provinsi Jambi 2020.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas di DP3AP2 Provinsi**Jambi**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2017	Rp. 263.350.000,-	Rp. 212.930.650,-	80%
2018	Rp. 238.550.000,-	Rp.224.332.000,-	94%
2019	Rp. 229.900.000,-	Rp. 227.249.000,-	98%

Sumber : Subbagian Perencanaan Keuangan DP3AP2 Provinsi Jambi 2020.

Tabel 2 ini menjelaskan anggaran yang didanai untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang berada di DP3AP2 Provinsi Jambi, dilihat dari realisasi anggaran tahun 2017 untuk pemeliharaan kendaraan dinas hampir setiap tahun mendekati target , walaupun adanya alokasi anggaran pemeliharaan tidak menjamin kendaraan tetap akan selalu berada pada kondisi yang bagus dan juga setiap kendaraan yang ada di DP3AP2 Provinsi Jambi memiliki usia rata-rata diatas 10 tahun. Pada setiap kendaraan memiliki perawatan yang berbeda-beda sesuai dengan usia dan jenis kendaraan masing-masing. Hal tersebut menyangkut dengan masalah yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pengalokasian Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas.

Tabel 3. Kondisi Kendaraan Dinas Yang Rusak dan Hilang di DP3AP2 Provinsi Jambi

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI	KONDISI	KETERANGAN
1.	HONDA WIN	BH 6718 AZ	Rusak Berat	Roda Dua
2.	Yamaha RX 115	BH 4839 AZ	Rusak Berat	Roda Dua
3.	Honda Supra X 125	BH 4521 AZ	Rusak Ringan	Roda Dua
4.	Honda New Supra X 125 CW	BH 2921 HZ	Hilang	Roda Dua

Sumber : Subbagian Kepegawaian Bagian Umum DP3AP2 Provinsi Jambi.

Pada Tabel 1 dapat dilihat ada dua jenis kendaraan yang di biayai/dipelihara di DP3AP2 Provinsi Jambi yaitu roda empat berjumlah 11 Unit, roda dua berjumlah 13 Unit, dengan total jumlah 24 Unit kendaraan dinas yang dipelihara/dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tabel 3 menjelaskan kondisi kendaraan yang rusak dan hilang.

Fenomena yang terjadi dilapangan penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas walaupun adanya alokasi anggaran pemeliharaan tetapi masih ada kendaraan dinas yang termasuk dalam daftar aset berada dalam kondisi rusak atau tidak dapat digunakan dan hilang.

Dilihat dari latar belakang diatas maka peneliti ini ingin meneliti tentang “Akuntabilitas Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Operasional di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Akuntabilitas Anggaran Pemeliharaan Kendaraan

Operasional di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah Mengetahui Akuntabilitas Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Operasional di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Untuk kedua manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama berkaitan dengan keuangan negara khususnya mengenai Akuntabilitas Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Operasional di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan sebagai masukan bagi pihak pihak yang terkait dalam mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Operasional di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Dwiyanto, Agus, 2011, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Lukito, Penny Kusumastuti. 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi ke Depan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: AFABETA.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Yufuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Abdurrahman & Soejono. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Erlangga.
- Halim Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun, 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Lionardo Andries. 2011. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Tunggal Mandiri.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. LAN: Jakarta.
- Pasolong Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Juliana, Pipit. 2017. *Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan*.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Lain-lain

Guru Pendidikan . *Anggaran*. <https://www.gurupendidikan.co.id/anggaran/> (diakses 27 Januari 2020 pukul 19.50)

Kendaraan Dinas. https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_dinas (diakses 27 Januari 2020 pukul 20.01)